

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang.

Pembangunan ekonomi ialah aktivitas yang dilakukan dalam jangka Panjang hingga akibat yang dihasilkan tidak cuma secara fisik saja melainkan secara social, politik serta ekonomi (Hasan & Aziz, 2009). Kesejahteraan ialah keberhasilan dari pembangunan ekonomi sebab pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang besar hendak menghasilkan pertambahan jumlah produksi yang nantinya akan menaikkan upah. Meningkatnya upah akan menciptakan masyarakat bisa penuhi kebutuhannya baik secara material ataupun spiritual dimana kesimpulannya akan meningkatkan kesejahteraan. Akibat ekonomi pembangunan ini diperparah sebab terdapatnya permasalahan pandemi covid-19 yang menyerang bermacam negeri termasuk Indonesia memberikan imbas terhadap social serta ekonomi di masyarakat.

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019-2021

(Ribuan Orang).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.

Berdasarkan Grafik 1.1 Tentang Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dapat diketahui bahwa Jawa Barat meraih jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dari jumlah penduduk yang banyak ini tentunya sumber daya manusianya berlimpah tapi apakah sumber daya manusia ini berkualitas, lalu bagaimana dengan lapangan perkerjanya tercukupi atau kurang, penyerapan tenaga kerja tinggi atau rendah, dan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya. Maka penelitian ini bertujuan membahas ini dan melihat bagaimana pengaruh langsung, tidak langsung, dan total pengaruh.

Pembangunan sendiri mempunyai sebagian tujuan, pertama guna menaikkan standar hidup setiap orang, baik pendapatannya, tingkat mengonsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, serta pendidikan. Kedua, penciptaan bermacam keadaan yang membolehkan tumbuhnya rasa yakin diri setiap orang lewat pembuatan sistem sosial, politik serta ekonomi dan Lembaga sosial yang menunjang martabat serta rasa hormat untuk setiap orang.

Ketiga, meningkatkan kebebasan berdemokrasi, kebebasan berkomentar, setiap orang diberikan kebebasan dalam memilah dalam berbagai variabel opsi yang terdapat. Untuk itu, pembangunan wajib meliputi seluruh bidang secara merata. Tolak ukur guna memandang keberhasilan pembangunan disuatu negeri salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang membuktikan produk domestik regional bruto (PDRB), kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kemajuan struktur produksi, dan penyerapan tenaga kerja yang tujuan akhirnya bakal menambah kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi serta kebalikannya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (Bappeda, 2017). Pembangunan ialah upaya transformasi struktural yang bertujuan guna meningkatkan produktivitas serta menciptakan peluang kerja yang akhirnya akan menambah penghasilan penduduk, tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, Makmur, serta sejahtera.

Kesejahteraan ialah titik ukur untuk sesuatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut bisa diukur dari kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan serta kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dicapai bila sesuatu seorang sanggup penuhi kebutuhan material ataupun kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual (semacam Pendidikan) terpenuhi hingga akan ada respon timbal balik yaitu pendapatan yang besar bagi individu tersebut serta untuk secara ekonomi akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang meningkat disebabkan terdapatnya kenaikan standar hidup setiap

orang. Berbagai indikator bisa digunakan guna memantau kemajuan pembangunan di suatu wilayah, baik indikator ekonomi ataupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat selaku objek pembangunan, hingga dibutuhkan suatu indikator guna mengukur pertumbuhan kehidupan ataupun tingkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan merupakan PDRB (produk domestik regional bruto).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negaranya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut undang-undang No. 11 tahun 2009). Dari undang-undang di atas dapat kita ambil dan pahami bahwa ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai jika kebutuhan material (seperti pendapatan, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.) dan kebutuhan spiritual (seperti Pendidikan, ketentraman hidup, keamanan.) dapat terpenuhi.

Menurut Abdul Rahman (2018: 18) Masyarakat itu sendiri tidak mengetahui apa pentingnya kesejahteraan dan pemahaman jelas tentang apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai pemberian bantuan barang dan uang kepada suatu kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial. Padahal kesejahteraan masyarakat ini menyangkut seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan hakekat dan martabat untuk dapat mengatasi

berbagai masalah sosial yang dihadapi warga negara, seseorang, masyarakat, untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya kesejahteraan masyarakat tidak merata ini diakibatkan penyerapan tenaga kerja tidak bisa maksimal akan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan material (seperti Kesehatan.) juga kebutuhan spiritual (seperti Pendidikan.).

Upaya untuk menganalisis status komparatif pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif telah dilakukan oleh United Nations Development Program (UNDP) sejak tahun 1990. Pada dasarnya, ada 2 indikator yang diharapkan mampu mengukur pembangunan antara berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik, serta indikator yang diharapkan mampu mengukur pembangunan dalam kerangka kualitas hidup. Berdasarkan kombinasi penggunaan indikator tersebut, dihasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau identik dengan Human Development Index (HDI). Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk

mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2021). Menurut Todaro (1999) IPM merupakan indikator terbaru untuk pengukuran keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Indeks yang disusun UNDP ini merupakan kombinasi data sosial dan ekonomi sehingga merupakan ukuran kinerja pembangunan yang lebih luas. Upaya pencapaian nilai IPM pada suatu tingkat yang lebih tinggi menjadi fokus kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh beberapa daerah / negara.

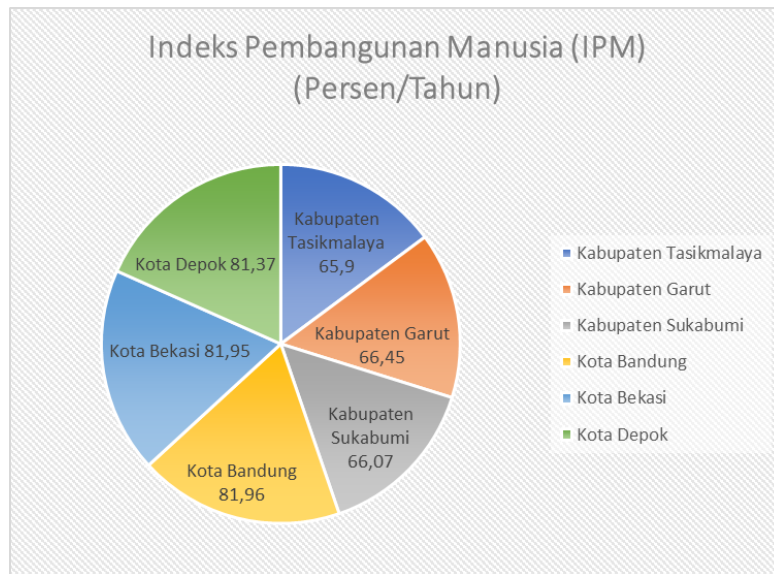
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas maka akan mudah mendapatkan pekerjaan dan juga akan memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya. Tapi pada kenyataannya kesejahteraan masyarakat masih rendah hal ini akibatkan jumlah penduduk yang terus meningkat dan lapangan pekerjaan yang terbatas akan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Maka diperlukan peran pemerintah dalam membantu indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat lewat sarana yang mencukupi.

Grafik 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun

2014-2021

(Persen/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.2 tentang Indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2021 (Persen/Tahun) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dicapai oleh Kota Bandung dengan persentase sebesar 81,96% (Persen) pada tahun 2021 dan Indeks Pembangunan Manusia terendah dicapai oleh Kabupaten Cianjur dengan persentase sebesar 65,56% (Persen) pada tahun 2021. Terdapat Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup jauh antara di Kota dan Kabupaten, hal menjadi salah satu faktor pendorong kenapa indeks pembangunan manusia di kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan di kabupaten adalah kondisi tempat tinggal. Wilayah kota relatif lebih mudah untuk mengakses kesehatan yang lebih memadai, lebih mudah mendapatkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan di wilayah kabupaten cukup sulit untuk mendapatkan kesehatan yang memadai, sedikit tempat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah investasi. Investasi atau penanaman modal yang dimaksud itu ialah kegiatan dalam melakukan penanaman modal atau menyimpan beberapa kekayaan yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri untuk terciptanya usaha sendiri. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing diusahakan dapat membuat lapangan kerja baru yang banyak menyerap tenaga kerja yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing bisa memainkan peranan yang positif bagi suatu masyarakat yaitu untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran suatu masyarakat. Negara biasanya menggunakan investasi atau penanaman modal dalam negeri untuk mengatasi masalah ekonomi di masyarakat misalnya: kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi atau penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing bisa menjadi penciptaan perkiraan soal membangun usaha baru atau perbaikan usaha yang sedang berjalan. Yang nantinya investasi ini dapat mengatasi masalah ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja baru dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi karena hal ini pendapatan masyarakat meningkat yang menciptakan terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan spiritual yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Klasifikasi realisasi investasi berdasarkan kabupaten/kota sangat bermanfaat untuk melihat potensi terkini dari suatu daerah sangat bermanfaat terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan

wilayah mencakup berbagai aspek yang tentunya mempertimbangkan peran keterkaitan antara kabupaten dan kota yang harus mengadopsi daripada potensi, daya saing serta keunggulan bahkan kelemahan dari masing-masing kabupaten/kota. (Bidang Data Dan Informasi PMPTSP, 2021).

Grafik 1.3

Jumlah Realisasi Investasi Atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021

(Proyek/Tahun)



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

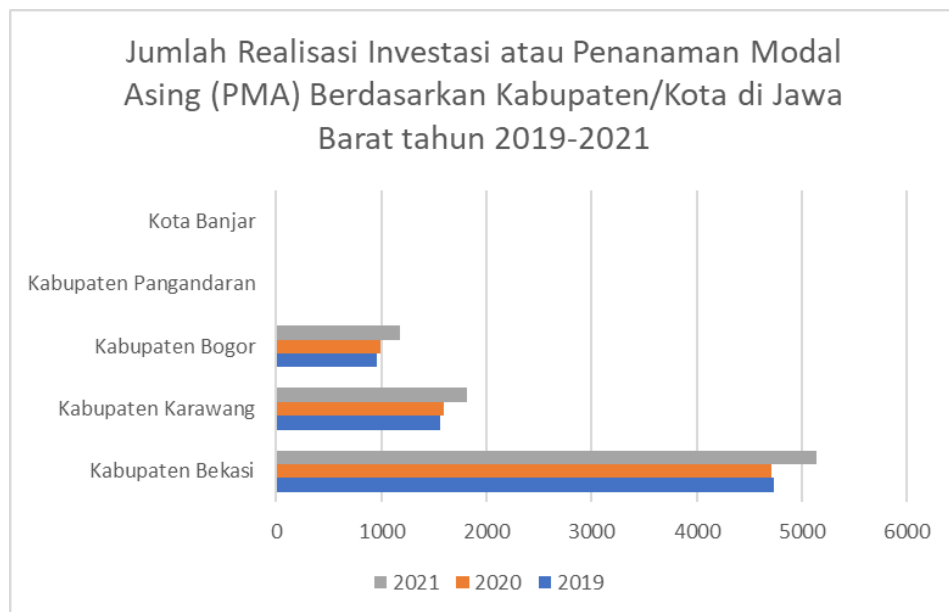
(DPMPTSP) Jawa Barat.

Pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Proyek) mengalami perkembangan yang fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah realisasi investasi atau penanaman modal dalam negeri terbesar pada tahun 2021 sebanyak 2890 Proyek diperoleh oleh Kabupaten Bogor, jika dilihat dari Grafik 1.3 sepanjang tahun 2019-2021 Kabupaten Bogor mengalami

perkembangan fluktuasi setiap tahunnya. Dan Jumlah realisasi investasi atau penanaman modal dalam negeri terkecil pada tahun 2021 sebanyak 34 (Proyek) diperoleh oleh Kabupaten Tasikmalaya, jika dilihat dari Grafik 1.3 sepanjang tahun 2019-2021 Kabupaten Tasikmalaya mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Grafik 1.4

Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021.
(Proyek/Tahun)



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat.

Pada Grafik 1.4 menunjukkan bahwa Jumlah Realisasi investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Proyek) mengalami perkembangan yang fluktuasi setiap tahunnya.

Jumlah realisasi investasi atau penanaman modal luar negeri pada tahun 2021 sebesar 5146 (Proyek) diperoleh oleh Kabupaten Bekasi, jika dilihat dari Grafik 1.3 sepanjang tahun 2019-2021 Kabupaten Bekasi mengalami perkembangan fluktuasi setiap tahunnya. Dan Jumlah realisasi investasi atau penanaman modal asing terkecil pada tahun 2021 sebanyak 1 (Proyek) diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran, jika dilihat dari Grafik 1.3 sepanjang tahun 2019-2021 Kabupaten Pangandaran mengalami perkembangan flutuasi setiap tahunnya.

Setelah indeks pembangunan manusia meningkat dan investasi atau penanaman modal dalam negeri meningkat hal ini akan menciptakan terbentuknya tenaga kerja yang berkualitas karena indeks pembangunan manusia meningkat dan menciptakan lapangan kerja yang baru karena investasi atau penanaman modal dalam negeri meningkatkan akan berdampak pastinya kepada penyerapan tenaga kerja yang lebih maksimal, Angkatan kerja yang banyak juga diharapkan akan mampu memicu meningkatnya kegiatan ekonomi akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah orang yang bekerja di berbagai sektor, jumlah tenaga kerja dan komposisi tenaga kerja akan secara terus menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan demografi. Jumlah pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan suatu ukuran untuk melihat serta mengetahui potensi sektor perekonomian mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan mencerminkan struktur perekonomian di suatu daerah. Penyerapan tenaga kerja salah satu pendukung pembangunan ekonomi

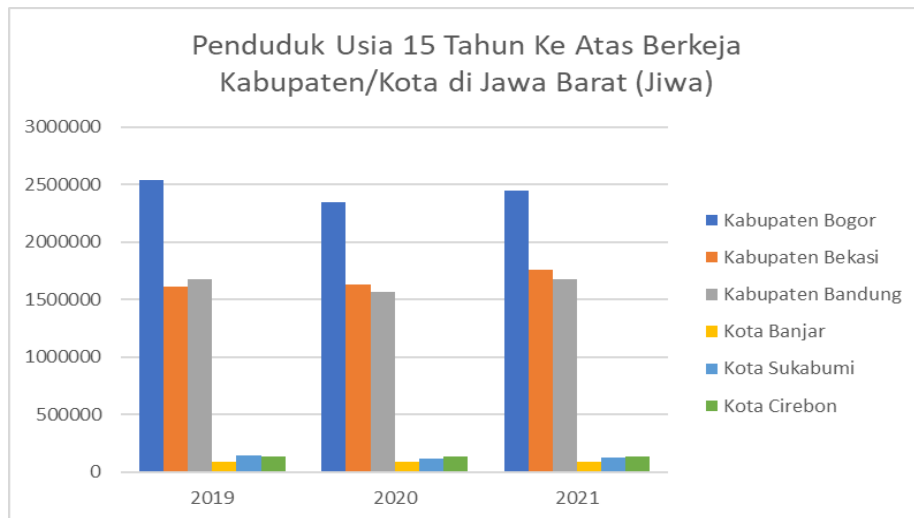
yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sebagaimana yang dijelaskan Shimer (Pratiwi, 2019). Penyerapan tenaga kerja juga bisa diartikan sebagai diterimanya tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja, dengan skill dan kemampuan yang dimiliki, diharapkan nantinya penduduk usia muda akan terserap dalam pasar tenaga kerja. Namun seiring berkembangnya zaman dan memasuki era perdagangan bebas ternyata apa yang diharapkan tidaklah sesuai dengan kenyataannya. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam hal ini penawaran (supply) lebih besar daripada permintaan (demand) tentunya menimbulkan masalah pengangguran. Tujuan otonomi daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja

Grafik 1.5

Penduduk Usia 15 tahun Keatas Bekerja Berdasarkan Kabupaten/Kota di

Jawa Barat Tahun 2019-2021

(Jiwa/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

Pada Grafik 1.5 menunjukkan bahwa Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Bekerja Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Jiwa/Tahun) mengalami perkembangan fluktuasi setiap tahunnya. Dimana tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah sebesar 2445768 jiwa pada tahun 2021, jika dilihat pada Grafik 1.5 sepanjang tahun 2019-2021 Kabupaten bogor mengalami perkembangan fluktuasi setiap tahunnya. dan Peduduk Usia 15 Tatahu Ke Atas Bekerja terendah dicapai oleh Kota Banjar dengan jumlah sebesar 88631 jiwa pada tahun 2021, jika dilihat pada Grafik 1.5 sepanjang tahun 2019-2021 Kota Bajar mengalami perkembangan fluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan aspek-aspek yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maka judul penelitiannya adalah **“PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA**

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014-2021.”

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kontribusi indeks pembangunan manusia dan investasi secara langsung, simultan, dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat ?
2. Apakah terdapat kontribusi indeks pembangunan manusia, investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja secara langsung, simultan, dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat ?
3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan sebgai berikut :

1. Untuk mengetahui terdapat kontribusi indeks pembangunan manusia dan investasi secara langsung, simultan, dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui terdapat kontribusi indeks pembangunan manusia, investasi, dan Penyerapan tenaga kerja secara langsung, simultan, dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung indeks pembangunan manusia dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis.

Kegunaan teoritis penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah informasi mengenai kesejahteraan masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2021.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang kontribusi indeks pembangunan manusia (IPM) dan investasi secara langsung, simultan, dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2021.
3. Dapat menambah pengetahuan tentang kontribusi indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, penyerapan tenaga kerja secara langsung simultan dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2021.

- b. Manfaat praktis.

Adapun kegunaan praktis penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penerima, memberikan pengetahuan tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Bagi instansi terkait, memberikan informasi tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, investasi terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2021.